

Eksistensi Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah oleh KPU Daerah Lampung Utara

Slamet Haryadi

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah
Kotabumi - Lampung

Abstrak

Akar permasalahan sengketa pilkada Lampung Utara adalah dilaksanakannya penghitungan ulang surat suara yang sudah disegel dan di simpan dalam kotak suara. Oleh KPUD dibuka kembali dengan dasar Pasal 103 ayat (1) huruf e. KPUD melaksanakan Penghitungan ulang pada tanggal 10 dan 11 September 2008. Oleh karena itu Eksistensi hukum pasal tersebut dipertanyakan, demikian juga bekerjanya hukum oleh Lembaga Peradilan terhadap Pasal 103 ayat (1) huruf e tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, Teori Hukum Murni Hans Kelsen sebagai konsep pendekatan dan menjawab masalah yang diteliti dengan mengurai dan mendiagnosis Pasal 103 ayat (1) huruf e dengan pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan penghitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah. Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KPUD telah melakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 103 ayat (1) huruf e. Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan di luar waktu dan tempat peristiwa konkret yang terjadi. Aspek dan bekerjanya hukum positif, oleh lembaga hukum tidak terlepas dari aspek politik, sosial, ekonomi sehingga bekerjanya hukum menjadi lamban dan tidak mampu menjelaskan kebenaran yang seharusnya dapat diungkap secara hukum.

Kata Kunci: pemilihan umum kepala daerah, politik, normatif

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konsep otonomi daerah telah meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Demikian pula dibentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pilkada diharapkan independen, jujur, dan adil, dapat tercermin di dalam melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam praktek pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di banyak daerah di Indonesia, menyimpan banyak masalah, dan terjadi di Kabupaten Lampung Utara yang pada tanggal 3 September 2008 melaksanakan pemilihan umum, diikuti oleh 6 pasangan calon, meskipun dalam perjalanannya dimenangkan oleh Pasangan Nomor 6 melalui proses hukum yang

panjang. Hingga sekarang ini masih menyimpan masalah terkait dengan status KPUD yang baru tanggal 26 Agustus 2009 ini diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa melanggar Pasal 118, 119 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara, semula diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon. Mendekati pelaksanaan kampanye peserta nomor urut 7 calon Bupati Hj. Zubaidah Hambali sakit dan meninggal dunia. Pada hari Jumat 22 Agustus 2008, menjelang digelarnya pemilihan bupati (pilbup), calon Bupati Lampung Utara, Hj. Zubaidah Hambali, 55, meninggal dunia di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta. (Harian Pos Kota) Meninggalnya Hj. Zubaidah menyisakan persoalan serius bagi partai Golkar yang akan terancam hak politiknya sebagai partai pengusung. KPU tidak mungkin melakukan penggantian calon, karena kotak suara sudah dicetak dengan foto Hj. Zubaidah Hambali. Untuk mengganti, tidak ada waktu lagi mengingat pilbup akan digelar 3 September 2008. Meninggalnya Calon Bupati Nomor Urut 7 menimbulkan masalah pada kertas suara karena dalam kertas suara yang sudah dicetak dengan peserta berjumlah 7 pasangan. Oleh karena itu Pleno KPUD yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pilkada, Partai pengusung, dan muspida menyepakati terhadap kertas suara diberi tanda silang dan dinyatakan **batal** bilamana ada yang mencoblos gambar pasangan nomor urut tujuh.

Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008 pada dasarnya telah berjalan lancar tertib dan aman, hal tersebut diketahui dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), disaksikan oleh masyarakat dan saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir tidak ada yang keberatan terhadap penghitungan surat suara. Surat Suara yang sah dihitung dan Surat suara yang tidak sah dinyatakan batal.

Pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 3 September telah selesai semua. Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dimasukkan dalam kotak yang berbeda dan disegel selanjutnya di antarkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan Rekapitulasi.

Hasil Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan disemua kecamatan tela berakhir (selesai) pada tanggal 6 September bila dijumlahkan semua hasil rekapitulasi PPK maka, pasangan yang unggul adalah pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana pula hasil pemantauan dan penghitungan oleh Desk Pilkada Pemda yang hasil perhitungan sementara di semua kecamatan yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2. KPUD tanggal 6 September 2008 itu pula melaksanakan rapat pleno, menyepakati untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil rekapitulasi PPK mengenai surat suara tidak sah, dengan alasan bahwa terjadi ketidakkonsistenan masyarakat di dalam pencoblosan surat suara sah dan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 berdasarkan surat pengaduan salah satu partai pengusung Calon nomor urut 6.

Berdasarkan keputusan rapat pleno KPUD tanggal 6 september tersebut, tanggal 10 dan 11 September KPUD menghitung ulang surat suara tidak sah untuk disahkan walaupun mendapat penolakan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pilkada dan Pasangan Calon umumnya, tetapi KPUD Lampung Utara tetap melaksanakan penghitungan ulang yang dilakukan terhadap 7 kecamatan. Bachtiar-Slamet Tolak Hitung Ulang - Pasangan kandidat bupati-wakil bupati Lampung Utara nomor urut dua, Bachtiar Basrie-Slamet Haryadi, menolak penghitungan ulang yang dilakukan KPU Lampung Utara. Pasalnya, pada penghitungan ulang, mereka yang awalnya unggul dinyatakan kalah dari pasangan lain. Pasangan usungan Koalisi Lampung Utara Bersatu tersebut mendatangi Kantor Bupati, KPU, dan Polres Lampung Utara pada Kamis (11/9) untuk meminta KPU mempertanggungjawabkan penghitungan ulang yang melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan keputusan KPU Lampung Utara. Pasangan itu juga meminta KPU Lampung Utara untuk berperan adil pada penghitungan suara Pilkada Lampung Utara. Pasangan itu mendatangi tiga tempat tersebut disertai 4.000 pendukung. Ketua Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB) Syamsu Erfan Zen yang dihubungi Kompas mengatakan, masalah timbul setelah salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor tujuh, Zubaidah Hambali-Subhan Effendi usungan Partai Golkar, digugurkan karena Zubaidah meninggal Jumat, 12 September 2008 (*Harian Kompas*).

KPUD Kabupaten Lampung Utara melaksanakan penghitungan ulang dengan cara mengundang Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara tidak sah di tempat yang KPU telah sediakan.

Hasil Perhitungan ulang surat suara tidak sah selanjutnya oleh KPUD ditambahkan dengan hasil surat suara yang sah. Pada tanggal 14 September KPUD melaksanakan pleno rekapitulasi dan penetapan pemenang Pilkada. Karena KPUD melalui penghitungan ulang, telah menjumlahkan surat suara yang tadinya tidak sah kemudian disahkan melalui penghitungan ulang telah ditambahkan dengan surat suara yang sah, hasil penetapan PPK sekabupaten Lampung Utara, maka hasil penetapan, dipastikan merugikan pasangan calon nomor 2, karena memang tujuan KPUD bersama calon pasangan lain untuk berbuat seperti itu.

Penghitungan ulang oleh KPUD dilaporkan oleh Pasangan Calon nomor 2 kepada Panitia Pengawas Pilkada dan Kepolisian Resort Lampung Utara, oleh karenanya hingga kini kelima anggota KPUD bersatus sebagai Tersangka, dan terhadap penetapan KPUD yang memenangkan Pasangan Calon nomor 6, diajukan gugatan keberatan ke pengadilan oleh Pasangan Calon nomor urut 2. Lampung Utara (SIB) Mungkin sebagian orang menganggap, KPU tak mampu diseret ke meja hukum terkait kasus Pilkada. Sebuah anggapan yang wajar, karena belum pernah terjadi. Tapi kali ini tidak, karena Kapolda Lampung menetapkan seluruh anggota KPUD Lampung Utara sebagai tersangka.

Kepolisian Daerah Lampung menetapkan semua anggota KPUD Lampung Utara sebagai tersangka. Penetapan ke 5 anggota KPUD tersebut karena dianggap telah melakukan tindak pidana dalam Pilkada Lampung Utara 3 September lalu.

Mereka melakukan penghitungan suara tidak sah, di mana hasil penghitungan itu memenangkan pasangan Zainal Abidin dan Rohimat Aslan sekaligus menganulir pasangan Bahtiar dan Selamat Hariadi.

Kapolda Lampung mengatakan penghitungan ulang itu melanggar pasal 118 UU no 32 tahun 2004 yakni penghitungan ulang tanpa sepengetahuan panitia pemilihan kecamatan.

Di samping penetapan anggota KPUD Lampung Utara sebagai tersangka, ternyata Pilkada Lampung Utara masih dalam sengketa di mana saat ini dalam proses di Pengadilan Tinggi Lampung.

Pasangan Bachtiar, Slamet yang diusung koalisi partai kecil menggugat KPUD Lampung Utara karena kemenangan mereka dianulir melalui penghitungan ulang padahal sebelumnya mereka unggul tipis atas pasangan Zainal. (Metro TV, 8 Oktober 2008).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan legal positivistik hukum murni Han Kelsen. (Hans Kelsen, 2006:2-3). Sumber data dalam bentuk Data Sekunder, yaitu bahan yang berasal dari buku-buku referensi, majalah ilmiah hukum, jurnal penelitian, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Analisis Data yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang aspek hukum dan bekerjanya hukum dalam peristiwa penghitungan ulang analisis *silogisme* sehingga didapat sebuah konklusi tentang hukum yang seharusnya bekerja menyelesaikan masalah dalam perhitungan ulang pilkada Kabupaten Lampung Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Pada Tanggal 9 Juli 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara priode 2008-2013 melalui rapat pleno, calon Bupati Dan Wakil Bupati ditetapkan nomor urut sebagai berikut:

NO NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Syahrul Jamal Bunga Masyang, SE – Drs. Azhar Ujang Salim
2. Bachtiar Basrie, SH., MM – Slamet Haryadi, SH., M. Hum.
3. Drs. Suhardi – Mardani Umar, SH
4. Sumanto, S. Pd – Edrin Indra Putra, S. Sos, MM.
5. Dr. Djauhari – Ahmad Mujib, S. Ag
6. Drs. Zainal Abidin, MM – Rohimat Aslan
7. Hj. Zubaidah Hambali – Subhan Efendi, SH

Pada tanggal 24 Juli 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 20/SK/KPU.KAB.LU/VII/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah di tempat pemungutan suara.

Pada tanggal 21 Agustus 2008, salah seorang Calon Bupati Nomor Urut 7 (Tujuh) Hj. Zubaidah Hambali, yang diusung Partai Golkar meninggal dunia sehingga menyebabkan pasangan calon nomor urut 7 (Tujuh) gugur. Oleh KPUD Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2008 dilaksanakan pleno, melalui berita acara dalam surat nomor 270/339/KPU.LU/VIII/2008 tentang pemberian tanda silang pada gambar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, berisikan;

- a) Pemberian tanda silang pada surat suara tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 (Tujuh)
- b) Pemberian tanda silang sebagaimana huruf a diatas menggunakan spidol warna hitam, dan dilakukan oleh KPPS dihadapan pemilih yang sekaligus dilakukan penandatanganan oleh KPPS, dan surat suara tersebut diberikan kepada pemilih dalam keadaan terlipat.
- c) Apabila terjadi pemilih masih ada yang mencoblos tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 (Tujuh), makasuara tersebut dianggap batal.
- d) Suarat suara yang batal sebagaimana huruf c dimasukkan kedalam kotak suara tidak sah.

Pada tanggal 3 September telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lampung utara bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Lampung. Pencoblosan dan penghitungan di tingkat TPS diseluruh Kabupaten berjalan lancar tidak ada masalah yang terjadi. Hasil Pencoblosan dan Penghitungannya oleh KPPS dimasukkan ke kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi.

Pada tanggal 4, 5, dan 6 september 2008 seluruh PPK se-Kabupaten Lampung Utara melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara. Tanggal 6 September seluruh PPK selesai melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara dan hasil rekapitulasi dalam kotak suara diserahkan semua ke KPUD Lampung Utara, kecuali PPK Kecamatan Kotabumi yang menyerahkan tanggal 7 September 2008, (copy rekapitulasi hasil penghitungan suara 23 PPK dan copy tanda terima penyerahan berkas rekapitulasi 23 PPK. Hasil pleno rekapitulasi oleh masing-masing PPK sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Jumlah Suara
1	Syahrul Jamal BM, SE - Drs. Azhar Ujang Salim, MM	13.749
2	Bachtiar Basrie, SH., MM – Slamet Haryadi, SH., M.Hum	99.300
3	Drs. Suhardi – Mardani Umar, SH	35.922
4	Sumanto, S.Pd. – Edrin Indra Putra., S.Sos.	5.249
5	Dr. Djauhari– Ahmad Mujib, S.Ag	28.519
6	Drs. Zainal Abidin,MM – Drs. Rohimat Aslan	98.793

Pada tanggal 6 september 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara melaksanakan rapat pleno yang menghasilkan Berita Acara Rapat Pleno, surat Nomor

: 270/346/KPU.KAB.LU/IX/2008 tentang penegasan Masalah Surat Suara yang dinyatakan Sah atau Tidak Sah.

Pada tanggal 6 September 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara kembali mengadakan rapat pleno dengan hasil Berita Acara Rapat pleno 270/346/KPU.KAB.LU/IX/2008 tentang penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS.

Gerakan Koalisi Lampung Utara bersatu (GILAS) pengusung pasangan calon nomor urut 6, melayangkan surat permohonan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah ke KPUD Lampung Utara, dengan alasan bahwa banyaknya surat suara yang dicoblos ke nomor 6 (enam) tembus ke nomor 7 (tujuh) sedangkan dilipat dan berada di balik nomor urut 6 (enam), GILAS mengatakan seharusnya surat suara sah karena yang dicoblos pemilih adalah nomor urut 6 (enam).

Pada tanggal 8 dan 9 September KPUD Kabupaten Lampung Utara mengundang Tim Kampanye masing-masing Calon untuk menghadiri Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah untuk disahkan.

Pada tanggal 10 dan 11 September 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara melaksanakan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah dalam kotak suara di TPS-TPS pada 7 PPK (Kecamatan) yaitu:

- a. Kecamatan Kotabumi
- b. Kecamatan Abung Selatan
- c. Kecamatan Abung Kunang
- d. Kecamatan Abung Timur
- e. Kecamatan Abung Semuli
- f. Kecamatan Abung Tengah
- g. Kecamatan Abung Surakarta

yang tersimpan dalam gedung KPUD Kabupaten Lampung Utara (Gedung KOPTI Sribasuki, Kecamatan Kotabumi).

Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Lampung Utara yang mendapat undangan menghadiri, tidak menghadiri acara dimaksud dengan alasan menyalahi undang-undang.

Penghitungan ulang semula hanya dihadapir 5 PPK, 3 PPK menolak penghitungan ulang dan 2 PPK meminta untuk menghadiri KPPS, para anggota PPK oleh KPUD Kabupaten Lampung Utara diminta membuat berita acara yang memberikan wewenang kepada KPUD Kabupaten Lampung Utara untuk menghitung ulang kotak suara tidak sah. 5 PPK yang semula menolak penghitungan ulang, tiba-tiba melaksanakan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan suara tidak sah pada 7 PPK, sedangkan Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara secara tegas menolak dan tidak menyetujui penghitungan ulang.

Saksi pasangan calon nomor urut 2 (Dua) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) juga secara tegas menolak dilaksanakannya penghitungan ulang, serta saksi-saksi tersebut diatas meninggalkan tempat penghitungan ulang. (cd 5 PPK rapat pleno menolak penghitungan ulang dan rekaman video penghitungan ulang suara tidak sah.

Bahwa dalam penghitungan ulang surat suara tersebut, juga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan ulang, antara lain dilakukan oleh pegawai sekretariat KPUD Kabupaten Lampung Utara dan oknum-oknum yang tidak berkepentingan. Penghitungan ulang suara tidak sah dilakukan dengan cara tidak sah pula mencoblos kertas suara batal dicoblos tembus supaya sah.

Pada tanggal 11 September 2008, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Lampung Utara Melaporkan kepada Kapolres Lampung Utara perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pilkada. Koalisi Lampung Utara Bersatu melalui OKTA KORPIKA melaporkan kepada Polres Lampung Utara tentang terjadinya Pelanggaran Pilkada oleh KPUD.

Pada tanggal 14 september 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara melakukan Rapat pleno rekapitulasi jumlah suara pasangan calon yang kemudian dituangkan kedalam keputusan KPUD Kabupaten Lampung Utara Nomor 31/SK/KPU.LU/2008 tentang penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Utara, dengan perincian hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Jumlah Suara
1	Syahrul Jamal BM., SE. - Drs. Azhar Ujang Salim, MM.	13.769
2	Bachtiar Basrie, SH., MM. – Slamet Haryadi, SH., M.Hum.	99.421
3	Drs. Suhardi – Mardani Umar, SH.	35.981
4	Sumanto, S.Pd – Edrin Indra Putra, S.Sos.	5.271
5	Dr. Djauhari – Ahmad Mujib, S.Ag	28.460
6	Drs. Zainal Abidin, MM – Drs. Rohimat Aslan	100.125

Dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Lampung Utara tersebut, banyak diajukan keberatan oleh para saksi dari pasangan calon tentang penghitungan surat suara, tetapi sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari KPUD Kabupaten Lampung Utara, keberatan para saksi tersebut adalah mengenai jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam berita acara dan rekapitulasi perolehan suara dari PPK, dan keberatan lainnya, yaitu hasil perolehan suara dari kotak suara yang dihitung ulang oleh KPUD Kabupaten Lampung Utara.

Pada tanggal 15 September 2008 pasangan calon nomor Urut 2 (Dua) melalui kuasa hukumnya melayangkan permohonan keberatan terhadap penghitungan Suara hasil pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara kepada

- a) Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Pengadilan Negeri Kotabumi
- b) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3.2. Analisis dan Pembahasan

3.2.1. Eksistensi Hukum Penghitungan Ulang (Pasal 103 Ayat (1) huruf e)

Penghitungan ulang di dalam penyelenggaraan Pilkada dibenarkan karena diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005. Pasal-pasal yang mengatur tentang penghitungan ulang. Akan tetapi Penghitungan ulang surat suara tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sebab yang menjadi dasar penghitungan ulang itu sendiri. Oleh karena itu sangat jelas dasar dan alasan sebagai berikut:

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas pada Pasal 103:

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 104

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.

-
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Dalam Pasal 90 PP Nomor 6 Tahun 2006

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPUD Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 91

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

-
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 92

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf e dalam kaitannya dengan penerapan hukum oleh KPUD, penting dikemukakan analisisnya, perlu diungkap peraturan hukum *in abstrakto* yang dijadikan dasar pelaksanaan peraturan yang benar, setelah meninggalkannya salah satu pasangan Calon Nomor urut 7 (Zubaidah Hambali) adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/339/KPU.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian tanda silang pada gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, secara tegas menyatakan bahwa apabila pemilih masih ada yang mencoblos tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 (tujuh), maka suara tersebut dianggap batal.
- b. Penghitungan Ulang Surat Suara, hanya boleh dilakukan di TPS.
- c. Penghitungan Ulang Surat Suara, hanya boleh dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut :
 - Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup.
 - Penghitungan Suara dilakukan ditempat yang kurang cahaya.
 - Saksi Pasangan Calon, Panwas, Pemantau dan Warga Masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas.
 - Penghitungan Suara dilakukan ditempat diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Dan / atau terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan suara yang sah dan tidak sah. (Pasal 103 ayat (1) UU 32/2004.jo Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005

Bahwa menurut hukum, "*Surat Suara dinyatakan sah, apabila tanda coblos HANYA terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon atau dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama satu pasangan calon atau lebih dari satu t a p i masih dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama satu pasangan calon*". (Pasal 95 huruf b UU No.32 tahun 2004 Jo. pasal 82 huruf b PP No. 6 tahun 2005).

Sedangkan alasan Protes dan Permohonan Penghitungan ulang Surat Suara Tidak Sah yang diajukan oleh GILAS dan saksi PPK dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), adalah coblosan yang berada pada 2 (dua) kotak segi empat yang berbeda, yang memuat 2 (dua) pasangan calon, dan memuat 2 (dua) nomor serta memuat 2 (dua) foto dan memuat 2 (dua) nama pasangan calon yang berbeda, yaitu pasangan calon nomor urut 6 (enam) dan pasangan calon nomor urut 7 (tujuh). Oleh karenanya demi hukum, maka Surat Suara yang dicoblos pada 2 (dua) kotak

segi empat yang berbeda, yang memuat 2 (dua) pasangan calon, dan memuat 2 (dua) nomor serta memuat 2 (dua) foto dan memuat 2 (dua) nama pasangan calon yang berbeda, adalah batal dan atau tidak sah.

i. Bahwa menurut hukum, Protes atau Keberatan yang dapat diajukan oleh GILAS dan saksi PPK tersebut diatas, adalah Protes / Keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di TPS oleh PPK, yaitu apabila penghitungan Suara itu dilakukan menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Dan yang diprotes itu adalah terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara dan / atau bukan terhadap keabsahan Surat Suara. (vide pasal 97 Jo. pasal 98 UU No.32 tahun 2004 Jo. pasal 85 ayat (3) PP No. 6 tahun 2005).

ii. Bahwa oleh karena Protes dan Permohonan Penghitungan ulang terhadap Surat Suara yang diajukan oleh GILAS dan saksi PPK dari pasangan calon nomor urut 6 (enam) *tidak dilakukan di TPS dan bukan terhadap jalannya penghitungan suara*, maka demi hukum, Protes atau Keberatan serta Permohonan Penghitungan Ulang Surat Suara tersebut, adalah tidak sah karena tidak beralasan menurut hukum,

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 103 ayat (1) huruf e di atas, maka tidak ada alasan yang kuat Pasal 103 ayat (1) huruf e dijadikan dasar penghitungan suara tidak sah terhadap surat suara apalagi yang tidak sah yang telah masuk kedalam kotak dan dalam keadaan disegel, yang dilakukan hanya berdasarkan Protes dan Permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) dengan menggunakan alasan terjadi ketidakkonsistenan di dalam pencoblosan terhadap suara yang sah dan tidak sah. Oleh karena itu pasal 103 ayat (1) huruf e, eksistensinya hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang terjadi di tempat dilaksanakannya pemungutan suara seperti di TPS ataupun di tingkat PPK. Dalam peristiwa penghitungan oleh KPUD di Gedung Kopti atau Gudang KPUD maka eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf e sangat lemah dan menimbulkan aspek hukum yang tidak baik bagi pelaksanaan pilkada langsung, jujur dan demokratis serta berkepastian hukum.

3.2.2. Aspek Hukum Penghitungan Ulang

Alasan terjadi ketidak-konsistenan di dalam pencoblosan surat suara sah dan tidak sah sehingga dilaksanakan penghitungan ulang didasarkan sebagaimana Pasal 103 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau;

- e. *Terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;*

Penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf e oleh penyelenggara Pilkada (KPUD) dengan cara melaksanakan penghitungan ulang yang dilakukan di Gedung Kopti (gudang penyimpanan kotak suara KPUD), prosedurnya dilakukan dengan cara mengundang Panitia Pengawas Kecamatan Saksi pasangan calon dan saksi-saksi di PPK.

Oleh karena itu bila yang dimaksud Pasal 103 ayat (1) e tanpa ada ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang penghitungan ulang tersebut, secara hukum dibenarkan dan sah. Akan tetapi sebagaimana eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf e harus di kaitkan dengan aturan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang bunyinya secara tegas adalah sebagai berikut:

Ayat (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS;

Ayat (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS; dan

Ayat (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya;

Oleh karena itu, meneliti dan mempelajari pasal 103 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) hukumnya sangat jelas bahwa KPU telah menyalahi tatacara penghitungan ulang, dan KPUD telah melampaui kewenangan penyelenggara di tingkat bawahnya yang telah dilaksanakan seperti KPPS telah menghitung surat suara, dan dalam penghitungan tidak ada yang keberatan baik dari saksi dan masyarakat tentang adanya kesalahan di dalam pencoblosan antara surat suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu hasil Penghitungan suara dimasukkan kotak dan dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Panitia Pemungutan suara tingkat desa/kelurahan.

Bahwa di tingkat Rekapitulasi dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan juga dilaksanakan secara wajar tidak ada yang keberatan terhadap hasil penghitungan surat suara ditingkat TPS oleh karena itu pada tanggal 6 September semua berita acara rekap telah diserahkan kepada KPUD.

Bahwa bila permasalahannya terjadi di tingkat KPUD, kenyataannya KPUD belum melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, dengan kata lain Pasal 103 ayat (1), (2), (3), (4) tidak cocok atau tidak sesuai dengan kehendak KPUD melaksanakan Penghitungan ulang di Gedung Kopti tersebut.

Bahwa Terhadap Pelaksanaan penghitungan ulang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jelas mempunyai segi hukum yang merugikan bagi pasangan calon yang mengikuti pilkada yaitu:

1. Penghitungan ulang menyebabkan suara pasangan calon lain ada yang berkurang dan ada yang bertambah.
2. Bahwa karena pelaksanaan penghitungan ulang tidak sejalan dengan maksud undang-undang, maka dalam Pasal 118 dan 119 UU Nomor 32 Tahun 2004 jelas memberikan ancaman terhadap KPUD atas pelaksanaan penghitungan ulang sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

(6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Uraian di atas dapat dibandingkan dengan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota yaitu:

Pasal 2 ayat (5) Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 3 ayat (5) Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang; a. Kesalahan dari Penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil suara penghitungan yang benar menurut Pemohon; b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Pasal 4 Ayat (6) Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 118 dan Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004 memiliki segi hukum pidana terhadap perbuatan KPUD yang melaksanakan penghitungan ulang. Sedangkan Pasal 106 memiliki segi hukum perdata khusus yaitu Pengadilan dapat memeriksa dan mengadili keputusan KPUD didalam menyelenggarakan KPUD.

Arsip Surat notulen Rapat Penyelenggara pilkada (KPUD) tanggal 6 September 2008 yang menjadi dasar dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan Pleno tanggal 6 September 2008 nomor 270/346/KPU-KAB/IX/2008 Tentang Penegasan Masalah Surat Suara yang dinyatakan SAH dan TIDAK SAH, dan nomor 270/347/KPU.KAB LU/IX/2008 tentang Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara yang dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS. Maka pada kenyataan yang telah terjadi adalah ketidak-konsistensian penyelenggara dalam melaksanakan pilkada.

Meneliti dan mempelajari dokumen rapat pleno dan terbentuknya keputusan Pleno tanggal 6 September 2008 tentang Penegasan Masalah Surat Suara yang dinyatakan Sah dan Tidak Sah, maka seharusnya penghitungan ulang terkait dengan perkara tersebut adalah penghitungan ulang terhadap ketidak-konsistensian pencoblosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut:

"Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila"

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon, atau

- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat, foto dan nama pasangan calon, atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Demikian pula dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur hal yang sama dengan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, serta ketentuan KPU Propinsi Lampung terkait dengan surat suara sah dan tidak sah yang telah membuat Keputusan nomor 270/370/KPU LPG/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008; dengan kata lain masalah konsistensi terdapat dalam ruang lingkup pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas.

Penyelenggara Pilkada (KPUD) mendasarkan ketidak-konsistensian berdasarkan pada keberatan yang disampaikan oleh surat Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera (Gilas) Parpol Pengusung Calon Pasangan Nomor 6 tanggal 6 September 2008, tetapi peristiwa hukumnya tidak secara jelas, di tempat pemungutan suara mana terjadi inkonsistensi, berapa surat suara yang inkonsistensi, sehingga alasan penghitungan ulang surat suara tidak sah karena terjadi ketidak-konsistensian di dalam pencoblosan menjadi suatu yang abstrak dan tidak jelas kebenarannya, karena dari keenam saksi dari masing-masing pasangan calon hanya saksi Nomor Urut 6 yang keberatan sedangkan saksi yang lain tidak keberatan.

Seharusnya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terlebih dahulu ada pengaduan dari Panitia Pengawas Pilkada untuk menentukan dengan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan untuk disampaikan kepada KPU, bukannya KPUD secara langsung mengambil alih atau menerima langsung pengaduan tersebut. Bahwa yang menjadi tidak logis adalah semua saksi tidak ada yang keberatan terhadap perhitungan yang telah dilaksanakan di tingkat TPS maupun PPK, tiba-tiba setelah semua mengumpulkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK kepada KPU, KPU melakukan bukan menyiapkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat KPUD tetapi justru mengadakan penghitungan ulang surat tidak sah.

Dari uraian di atas, aspek hukum pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang hanya mendasarkan pada surat Pengaduan Gilas, bukan persoalan yuridis, melainkan sebagai upaya sistematis dan terstruktur agar KPUD secara politis yuridis mendapat alasan prosedural melakukan penghitungan ulang. Tetapi pada intinya kepentingan politis KPUD telah menggunakan peraturan hukum in abstrakto untuk diterapkan dalam pelaksanaan penghitungan ulang.

Mempelajari dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara oleh PPK dari semua kecamatan bila dijumlahkan, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh 23 PPK se Kabupaten Lampung Utara, KPUD mengetahui yang unggul dalam perolehan suara adalah calon pasangan nomor urut

2, dengan memperoleh 99.300 suara, dibandingkan pasangan calon Nomor Urut 6 yang memperoleh 98.793 suara.

Selain KPUD dan Tim Kampanye Pasangan Nomor 2 yang mengetahui bahwa tanggal 6 September hasil perolehan sementara Pilkada Lampung Utara sudah diketahui adalah Desk Pilkada Pemda Lampung Utara dan Panwas Pilkada Lampung Utara bahwa Pasangan calon nomor urut 2 yang unggul. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang penghitungan ulang telah diabaikan oleh KPUD dan KPUD tidak independen dalam melaksanakan pilkada Lampung Utara.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya tentang eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf e dan Aspek serta bekerjanya hukum dalam melihat eksistensi hukum Pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPUD telah melakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 103 ayat (1) huruf e. Bahwa pasal tersebut dapat dilaksanakan diluar waktu dan tempat peristiwa konkret yang terjadi. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 103 UU nomor 32 cukup jelas.
2. KPUD meskipun telah salah dalam menafsirkan Pasal 103 ayat (1) huruf e, akan tetapi relasinya dengan KPUD selaku penyelenggara Pilkada, memiliki kekuasaan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah sehingga penghitungan ulang tetap dilaksanakan.
3. Bahwa Segi Hukum pelaksanaan Penghitungan ulang, oleh lembaga peradilan di Lampung Utara (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) tidak cukup memiliki pengetahuan dan pengalaman yuridis terhadap perkara *inkonkreto*, sehingga tidak ada tindakan hukum untuk menghentikan atau memproses secara cepat perkara tersebut sebagai perkara yang melanggar Pasal 118 dan Pasal 1119 UU nomor 32 Tahun 2004.

4.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pilkada sebaiknya berasal dari unsur yang heterogen yaitu berasal dari Kepolisian dan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi agar dapat menjamin netralitas dan tanggung jawab pelaksanaan yang objektif dan demokratis.
2. Lembaga Peradilan harus menjadi sistem penegakan hukum yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada dengan pemahaman yuridis dari tahapan-tahapan sehingga dapat melakukan analisis yang tepat terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharadjo, Dardji dan Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Indah
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Macridis, Roy C. 1996. *Perbandingan Politik; Catatan dan Bacaan*, Jakarta: Erlangga
- Rodee, Carlton Clymer dkk. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Terjemahan. Hamid Zulkifli. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Ronnny Hanindityo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali Press
- Supriyatno. 2008. *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah; PILKADA*, Jakarta: Pustaka Mina
- Sutoro, Eko, 2008 *Menghapus Pilkada Langsung* Yogyakarta:

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Agustus 1993.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Penerbit Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung, Jakarta Agustus 1997, Cetakan ke 2, Jakarta, Oktober 1997.
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.
- Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, 2007 Jakarta: Pustaka Yusitisia.

Lain-lain

Harian *Pos Kota*, edisi Jumat 22 Agustus 2008.

Harian *Kompas*, edisi Jumat, 12 September 2008

Harian *Sinar Indonesia Baru*, 8 Oktober 2008

Metro TV.

Dirjen Otda Depdagri, Makalah, *Evaluasi Satu Tahun Pilkada*, tanggal 28 Juni 2006.